

**PEMBEDAAN SKALA PRIORITAS PEMBAYARAN UTANG ANTARA
KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR DENGAN
KREDITOR KONKUREN YANG TERDAFTAR PADA DAFTAR
PIUTANG TETAP DALAM PERKARA PKPU
(Studi Kasus Putusan Homologasi No.54/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

INTISARI

Oleh:

Riki Ariansyah¹ dan Ninik Darmini²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan dan kedudukan hukum kreditor konkuren yang tidak terdaftar namun tercatat dalam pembukuan perseroan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU serta upaya hukum kreditor yang tidak terdaftar namun tercatat dalam pembukuan perseroan yang mendapatkan perbedaan skala prioritas dalam pembayaran utang berdasarkan Putusan Homologasi No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara dan alat penelitian yang digunakan adalah metode dokumen dan studi dokumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian tesis ini, bahwa pengaturan dan kedudukan hukum kreditor yang tidak terdaftar namun tercatat dalam pembukuan perseroan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari debitor yang PKPU sementara, dimana haknya ini akan dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan melalui pengadilan (homologasi) agar dipatuhi dan dilaksanakan para kreditor termasuk kreditor konkuren yang tidak terdaftar. Upaya hukum kreditor konkuren yang tidak terdaftar namun tercatat dalam pembukuan perseroan yang mendapatkan perbedaan skala prioritas dalam pembayaran utang berdasarkan Putusan Homologasi No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu mengajukan gugatan pembatalan putusan homologasi dengan alasan penetapan skala prioritas pembayaran utang tidak adil dan permohonan pailit oleh para kreditor konkuren yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian.

Kata Kunci: Skala Prioritas, Kreditor Konkuren, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) Universitas Gadjah Mada

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

*DIFFERENCES OF DEBT PAYMENT PRIORITY SCALE BETWEEN
UNREGISTERED CONCURRENT CREDITORS AND
CONCURRENT CREDITORS REGISTERED ON
LIST OF RECEIVABLES FIXED IN
PKPU CASE*

(Case Study of Homologation Decision No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

ABSTRACT

By:

Riki Ariansyah¹ and Ninik Darmini²

This study aims to find out and analyze the legal arrangements and legal positions of concurrent creditors who are not registered but are recorded in the company's books based on the Bankruptcy Law and PKPU as well as the legal remedies of creditors who are not registered but registered in the company's books that get differences in priority scale in debt payments based on Homologation Decision No. . 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

This thesis research is a normative legal research with a descriptive nature. This study examines library materials or secondary data such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods and research tools used are document method and document study. The analysis used in this research is qualitative analysis.

The results of this thesis research, that the arrangement and legal position of creditors who are not registered but are recorded in the company's books based on the Bankruptcy Law and PKPU still have the right to get payment of their receivables from debtors who are temporarily PKPU, where this right will be stated in a peace agreement that has been ratified through the court. (homologation) to be obeyed and implemented by creditors, including concurrent creditors who are not registered. Legal remedies for concurrent creditors who are not registered but are recorded in the company's books that have different priority scales in paying debts based on Homologation Decision No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. namely filing a lawsuit for the cancellation of the homologation decision on the grounds that the determination of the priority scale for payment of debts is unfair and the petition for bankruptcy by concurrent creditors who are not registered in the peace agreement.

Keywords: *Priority Scale, Concurrent Creditors, Postponement c
Payment Obligations.*

¹ Student of the Master of Law Study Program (Jakarta Campus), Universitas Gadjah Mada

² Lecturer of the Master of Law Study Program, Gadjah Mada University